

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Jakarta

Tanggal : 20 Januari 2011

Subyek : Tata Ruang

Hal : 15

### Penataan Infrastruktur

## Buruknya Tata Ruang Jadikan Kota Tak Efisien

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menegakkan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah telanjur karut-marut. Penerapan tata ruang yang tidak konsisten menjadikan kepadatan suatu kota semakin terkonsentrasi hingga akhirnya menimbulkan kemacetan transportasi. Apabila hal ini terjadi, dipastikan kota tersebut tidak efisien sehingga sulit berkembang. Hal ini diungkapkan oleh pakar infrastruktur perkotaan dari Harvard University Jose A Gomez-Ibanez dalam diskusi terbatas infrastruktur di Jakarta, Rabu (19/1).

Gomez mencontohkan potensi ketidakefisienan pengelolaan Kota Jakarta. Ia melihat adanya kongesti cukup tinggi di Kota Jakarta. Penerapan tata ruang yang tidak tegas menyebabkan penggunaan tata tanah land used semakin semrawut. Ini juga menyebabkan kapasitas transportasi massal berjalan tidak optimal. Terbukti masih adanya pengguna kendaraan pribadi yang lebih tinggi dibanding penggunaan kendaraan umum.

Bahkan, sekarang, kendaraan pribadi sudah hampir tergusur oleh hadirnya ribuan motor di Jakarta. Ia menyarankan pemerintah untuk fokus pada pemanfaatan kapasitas transportasi yang ada dalam mengurai kemacetan di Jakarta. Transportasi massal di Jakarta harus dapat dioptimalkan dengan mengatur rute yang efisien. Gomez juga menilai banyak kendaraan bus di Jakarta masih belum beroperasi secara efisien.

Selain pengoptimalan transportasi massal, dibutuhkan pembatasan kendaraan pribadi dengan menerapkan road pricing. Pada kesempatan yang sama, Bernadus Djonoputro, Direktur PT Nusantara Infrastruktur, mengatakan penataan kembali rencana tata ruang berbagai kota besar di Indonesia sudah mendesak dilakukan. Sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, kata Bernadus, pemerintah kabupaten/ kota harus membentuk RTRW paling lambat 2010. Tetapi kenyataanya, sekarang ini baru berjalan 10 persen saja dari sekitar 500 pemda di Indonesia membuat tata ruang baru.

Sedangkan 90 persen wilayah tidak memiliki acuan tata ruang yang jelas. Infrastruktur Tol Mengenai jalan tol, Bernadus mendesak KemenPU untuk tegas dalam pelaksanaan kontrak perjanjian jalan tol. Ia memperkirakan terus berlarut-larutnya pembangunan jalan tol di Indonesia karena tidak ada ketegasan pemerintah dalam menjalankan kontrak bersama dengan investor jalan tol. "Tidak ada ketegasan, bagaimana bisa berjalan cepat.

Kalau tak bisa langsung dialihkan ke investor lain dong," katanya. Ia menambahkan KemePU harus cepat mengambil tindakan apabila ada proyek yang tidak dapat berjalan. Sebenarnya infrastruktur tidak hanya jalan tol tetapi juga pelabuhan udara dan laut serta energi. Sekarang ini, PT Nusantara Infrastruktur memiliki pengelolaan beberapa jalan tol di Jakarta dan Makassar.

suh/E-8